

ABSTRAK

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak adalah pengangkatan anak. Legalisasi pengangkatan anak dianggap lebih menjamin hak dan kesejahteraan anak, di mana sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan, Pemohon (calon orang tua angkat) harus memperoleh izin pengangkatan anak yang pada kenyataannya tidak semua permohonan izin pengangkatan anak disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Tengah dan mengkaji kendala yang dihadapi serta menganalisis upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang memberikan izin, dan observasi terhadap pelaksanaannya. Penelaahan terhadap Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak juga dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dimulai dari Pemohon membawa persyaratan pengajuan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan melakukan *home visit* sebagai dasar pembuatan laporan sosial. Laporan sosial tersebut diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk disidangkan oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Jawa Tengah. Jika hasil sidang telah memenuhi syarat dan diperoleh rekomendasi Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan mengenai Izin Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan tersebut dilanjutkan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin adalah permohonan izin pengangkatan anak tidak semuanya disetujui karena persyaratan materiil ataupun administratif yang tidak terpenuhi, dan upaya yang ditempuh adalah dengan sosialisasi sebagai upaya preventif dan pendampingan terhadap calon orang tua angkat (COTA) sebagai upaya represif.

Kata Kunci : *Kesejahteraan Anak, Pengangkatan Anak, Pemberian Izin Pengangkatan Anak.*

ABSTRACT

One of the efforts to improve children's welfare is adoption. Legalization of adoption is considered to better guarantee the rights and welfare of children, where before obtaining a Court Order (Penetapan Pengadilan), the Petitioner (prospective adoptive parents) must obtain a license to adopt a child, which in fact not all applications for adoption permits are approved. This study aims to identify and describe the implementation of granting adoption permits as an effort to improve the welfare of children in Central Java Province and examine the obstacles faced and analyze efforts to overcome these obstacles.

The research method used is juridical empirical with a qualitative approach that produces descriptive analytical data. Methods of data collection using interviews with the Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah as the agency authorized to grant permits, and observation of its implementation. A review of the Court Decision regarding adoption was also carried out to enhance this research.

The results showed that the implementation began with the Petitioner bringing the submission requirements in writing to the Dinas Sosial Kabupaten/Kota, then the Dinas Sosial Kabupaten/Kota will conduct a home visit as the basis for making social reports. The social report was given to the Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah for trial by the Central Java Province Adoption Licensing Team (PIPA). If the results of the trial have met the requirements and a recommendation from the PIPA Team of Central Java Province is obtained, then a Decree regarding the Adoption Permit will be issued by the Head of the Social Service for the Province of Central Java (Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah). The Decree is continued to the Court to obtain a Court Order (Penetapan Pengadilan). The obstacles faced in the implementation of the granting of permits are not all applications for adoption permits because the material or administrative requirements are not fulfilled, and the efforts taken are socialization as a preventive effort and assistance to prospective adoptive parents (COTA) as a repressive effort.

Key Words : *Children's Welfare, Adoption, Granting Adoption Permits.*